

KR - 1-

RABU LEGI, 11 MEI 2016
(4 RUWAH 1949)



Analisis KR Pilkada DKI dan Kota Yogya

Dr Zuly Qodir

PEMILIHAN Kepala Daerah masih tahun depan, 2017. Namun dari sekian banyak daerah yang hendak melakukan pemilihan gubernur/walikota/bupati, tampaknya pemilihan di DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta menjadi menarik karena beberapa alasan. Selain hubungan kesejarahan, prosesnya sejak sekarang telah cukup menarik perhatian.

Pertama, kandidat yang muncul bukan hanya dari kalangan partai politik tetapi juga independen alias perseorangan. Kandidat perseorangan alias independen sebenarnya memberikan kontribusi politik yang positif pada masyarakat politik yang selama ini 'arogan' dalam berpolitik. Masyarakat politik yang kurang memperhatikan 'nasib masyarakat' hendak diadu dengan kehendak politik masyarakat banyak yang tidak berpartai.

Kedua, munculnya nama-nama baru yang diharapkan mampu memberikan harapan baru pada masyarakat tentang kepala daerah. Baik DKI Jakarta maupun Kota Yogyakarta mampu memunculkan nama-nama yang banyak dan baru dalam persaingan

* Bersambung hal 7 kol 1

Pilkada DKI

Pemilihan Kepala Daerah. Ini tradisi baru dalam politik Indonesia. Hal ini menandakan partisipasi politik warga negara di dua wilayah tersebut sangat dinamik.

Persoalan yang menang dari partai ataukah dari perseorangan tidak menjadi pembahasan utama tulisan ini. Tetapi munculnya kandidat perseorangan sebenarnya memberikan kritik yang cukup keras dan tajam pada partai politik. Untuk itu warga DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta diharapkan mampu memupuk harapan pada masyarakat yang telah kehilangan 'oase' kepemimpinan yang harmoni, toleran, beradab serta santun. Inilah yang telah hilang di DKI dan Kota Yogya yang harus dikembalikan lagi.

Ketiga, baik DKI maupun Kota Yogya merupakan wilayah yang memiliki basis kultural 'istimewa'. DKI Jakarta kita ketahui sebagai 'pusat' pertukaran politik dan kekuasaan, serta keuangan Indonesia. Jumlah penduduk tertinggi berada di DKI, sehingga dinamika politik pun demikian tinggi mempengaruhi suhu politik Indonesia secara keseluruhan. Jika DKI bergejo-

lak hampir bisa dipastikan politik di daerah pun bergejolak. Jika perekonomian DKI bergejolak, ekonomi nasional pun bergejolak.

Karena itu, mampu mengendalikan DKI secara politik-kekuasaan dan ekonomi secara tidak langsung dapat dikatakan 'mengendalikan politik-kekuasaan dan ekonomi nasional'. Peralnya, seringkali Pemimpin (Kepala Daerah) DKI yang terpilih tidak mampu mengendalikan dinamika politik-kekuasaan dan ekonomi di pusat Ibukota Negara RI. Hasilnya kondisi politik-kekuasaan dan ekonomi nasional pun sering tergoncang dengan dahsyat.

Sementara Kota Yogya sebagai pusat kekuatan politik Jawa memiliki kultur politik yang santun, beradab, *andhap asor*, toleran, saling memahami perbedaan dan harmonis dalam lima tahun terakhir tampak tidak menjadi sumber dalam kepemimpinan. Sepertinya, kurang mampu berdialog dengan kebudayaan Yogyakarta yang unggul, sehingga kadangkala menimbulkan perbedaan dengan masyarakatnya. Hal ini tentu membuat masalah serius antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin.

Sambungan hal 1

Dengan ketiga argumen tersebut, maka Pilkada di DKI dan Kota Yogya dapat kita jadikan titik tolak memperhatikan dinamika politik Indonesia. Apakah dalam proses pemilihan berlangsung dengan *fair play*, tanpa adanya intimidasi, membuka ruang partisipasi pada masyarakat, nondiskriminatif ataukah tetap dominan terjadi proses-proses politik yang intimidatif dan mempergunakan unsur SARA dalam pertarungan.

Kita berharap dengan banyaknya kandidat yang muncul di DKI dan Kota Yogya akan muncul pemimpin baru yang mampu memberikan harapan baru pada masyarakat. Masyarakat yang telah lelah, jenuh, bahkan muak dan marah pada para 'pemimpin lama' karena tidak mampu memberikan harapan yang memadai pada masyarakat atas 'janji-janji politik' saat kampanye.

Para kandidat kepala daerah yang hendak bertarung di DKI dan Kota Yogya tentu menjadi sorotan publik karena dua wilayah ini merupakan pusat dari pemerintahan yang 'berkultur istimewa'. DKI sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Sementara Kota Yogya sebagai pusat kota yang berkultur Jawa dengan pelbagai macam tradisi yang berkembang di dalamnya. Oleh sebab itu menjadi kepala daerah di Kota Yogya menjadi tidak memenuhi syarat jika tidak sesuai dengan 'kultur Jawa' yang penuh dengan makna simbolik dan kultural. Kini saatnya kita menunggu.